



Pengembangan Wisata Edukasi Mangrove melalui Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Sarah Nur Azhar

Universitas Galuh, Ciamis

Kiki Endah

Universitas Galuh, Ciamis

Erlan Suwarlan

Universitas Galuh, Ciamis

Alamat: Jl. R. E. Martadinata No.150, Mekarjaya, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

Korespondensi penulis: sarahnurazhar10@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by the lack of optimal collaboration between the Village Government and the community in the development of mangrove educational tourism in Babakan Village, Pangandaran District. The problems found include limited budgets for the procurement of educational infrastructure, low community participation, and lack of innovation from the management. This research aims to find out the extent to which the collaboration is running. The method used is descriptive qualitative, with data collection through literature studies, structured interviews, and observations. The results of the study show that the collaboration that has been established has not been optimal. Barriers include limited time and resources to support intensive communication, information complexity that reduces mutual trust and understanding, and differences in priorities and participation saturation that weaken commitment. Efforts that have been made include simplifying information through visual/digital media, establishing more informal discussion forums, and allocating more adequate resources to support sustainable development. It is necessary to increase the role and synergy between all parties so that the development of mangrove educational tourism can run more effectively and sustainably.*

Keywords: *Collaboration, Village Government, and Tourism Area Development.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kolaborasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengembangan wisata edukasi mangrove di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran. Permasalahan yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana edukasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya inovasi dari pihak pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi tersebut berjalan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara terstruktur, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin belum optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu dan sumber daya dalam mendukung komunikasi yang intensif, kompleksitas informasi yang mengurangi kepercayaan dan pemahaman bersama, serta perbedaan prioritas dan kejenuhan partisipasi yang melemahkan komitmen. Upaya yang telah dilakukan antara lain penyederhanaan informasi melalui media visual/digital, pembentukan forum diskusi yang lebih informal, serta pengalokasian sumber daya yang lebih memadai untuk mendukung pembinaan berkelanjutan. Diperlukan peningkatan peran dan sinergi antara seluruh pihak agar pengembangan wisata edukasi mangrove dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kolaborasi, Pemerintah Desa, dan Pengembangan Kawasan Wisata.

LATAR BELAKANG

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat di berbagai negara di dunia. Pengembangan objek wisata yang menarik dan berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong terjadinya pertukaran budaya. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata, kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat sangat penting.

Kolaborasi merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengembangan obyek wisata. Wujud kolaborasi dalam pengembangan pariwisata dilihat dari pembagian masing-masing pihak. Misalnya, peran pemerintah yakni berhubungan dengan kebijakan dalam menunjang pengelolaan pariwisata. Sementara tugas masyarakat adalah membangkitkan kesadaran tentang pentingnya kehadiran obyek wisata karena dapat melahirkan kreasi yang menjadi daya pikat pariwisata. (Adnan, 2024)

Dengan menggerakkan sektor pariwisata, pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata mempengaruhi kalangan bawah masyarakat dan kelompok ekonomi tertentu. Masyarakat di sekitar lokasi wisata dapat membangun berbagai bisnis seperti penginapan, layanan jasa transportasi dan informasi, toko dan lainnya yang dapat menambah pendapatan masyarakat serta menurunkan taraf pengangguran. Kelerestarian sumber daya alam dan budaya masyarakat pesisir dan laut diperlukan saat mengembangkan produk wisata, meskipun pengembangan ekowisata pesisir dan laut lebih dekat dengan aspek pelestarian karena sudah termasuk aspek keberlanjutan pembangunan. Pengembangan wisata dapat menambah banyak manfaat. (Nisa, 2024)

Salah satunya adalah wisata mangrove di mana penanaman mangrove dan adanya edukasi wisata mangrove dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan konservasi mangrove. Sesuai dengan prinsip pengembangan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan aturan ini ialah dasar aturan yang kuat untuk pertumbuhan pariwisata. Kabupaten Pangandaran mempunyai banyak tanggung jawab juga tantangan untuk membangun Pemerintah yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Pangandaran sebenarnya sudah memiliki banyak potensi di bidang pariwisata yang salah satunya merupakan Desa wisata (Maulana, 2025).

Desa wisata termasuk dalam masyarakat dan Pemerintah Desa, tetapi Pemerintah Desa memiliki posisi dan sumber daya yang berbeda dengan masyarakat. Sesuai Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang hak dan wewenang Desa yang mengatur dan mengurus masyarakatnya sesuai asal-usul, adat istiadat, serta nilai-nilai budaya masyarakatnya. Adapun pada pasal 18 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

menyebutkan bahwa: Desa mempunyai hak serta kewenangan dalam melaksanakan pembangunan yang ada di Desa, termasuk pada pengembangan Desa wisata. Dengan adanya Undang-Undang ini masyarakat dapat ikut serta dalam pengembangan Desa wisata.

Sesuai Peraturan Desa Babakan No.3 Tahun 2012, wilayah mangrove ditetapkan sebagai tempat wisata edukasi berbasis ekosistem dan konservasi alam hayati setelah bencana alam tsunami. Ada empat jenis mangrove yaitu *Avicennia alba*, *Rhizophora apiculata*, *Nypa fruticans* serta *Sonneratia alba*, ialah beberapa ekosistem mangrove yang ada di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Kawasan wisata bulaksetra mempunyai luas 17,5 hektar, serta telah ditanam Sejak tahun 2007, sejak itu mereka menanam 100 pohon mangrove. Dengan persentase luas lahan 33,73% dari total luas bulaksetra, jenis tutupan tanaman memiliki tingkat penutupan lahan tertinggi. Selain menjadi daya tarik wisata, hutan mangrove memainkan peran penting dalam penahan erosi dan sebagai tempat tinggal biota laut. (Nisa, 2024)

Kemudian dalam Peraturan Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam hayati serta Ekosistemnya. Tugas serta Fungsi asal pengurus tim penggerak serta pengelolaan kawasan pesisir Bulak Setra Desa Babakan di fokuskan terhadap pelestarian dan pengelolaan tanaman pantai khususnya Pengembangan pohon mangrove serta tanaman pantai lainnya dan pelestarian lingkungan hidup. Pengembangan dan pemberdayaan Potensi desa wisata, khususnya Desa babakan, diperlukan untuk memaksimalkan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manajemen destinasi wisata ini termasuk manajemen sumber daya manusia, manajemen pelayanan, manajemen strategis, dan manajemen pemasaran.

Kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat desa babakan untuk mengembangkan wisata edukasi mangrove di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran memegang peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan potensi desa wisata (Syafutra, 2023). Desa babakan ini memiliki hutan mangrove yang tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi juga sebagai daya tarik wisata berbasis lingkungan dan juga menyoroti pentingnya seni manajemen pengembangan ekowisata mangrove dan memiliki nilai edukasi bagi pengunjung sekaligus mendukung pelestarian lingkungan untuk menaikkan taraf kehidupan masyarakat serta menggali potensi yang ada kemudian meningkatkan taraf kehidupan warga lokal, melestarikan lingkungan, oleh karena itu dibutuhkan adanya kolaborasi Pemerintah Desa dan masyarakat yang menggabungkan aspek pembangunan yang berkelanjutan akan memberikan hasil yang positif untuk masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan masalah Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Edukasi Mangrove di Desa Babakan Kecamatan

Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator masalah diantaranya :

1. Adanya keterbatasan anggaran yang dikeluarkan oleh desa untuk menunjang pengadaan sarana dan prasarana untuk tempat pertemuan sebagai sarana dan untuk memberikan informasi edukasi tentang mangrove.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata edukasi mangrove dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama untuk melaksanakan bagian dari kebijakan.
3. Kurangnya inovasi pengelola dalam mengolah wisata edukasi mangrove, hal ini membutuhkan adanya kolaborasi atau kerjasama untuk mendukung pengembangan wisata edukasi yang lebih kreatif dan efektif.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk menyusun dan membahasnya dalam karya tulis yang berjudul **Pengembangan Wisata Edukasi Mangrove melalui Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.**

KAJIAN TEORITIS

Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Edukasi Mangrove. Sebagaimana dijelaskan oleh Ansell dan Gash (dalam Islamy, 2008 : 12) bahwa komponen kolaborasi dibagi menjadi empat bagian yaitu : Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan dan Proses Kolaborasi.

- 1) Kondisi Awal, yaitu mengungkapkan bahwa banyaknya proses kolaborasi yang gagal dikarenakan perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan dan stakeholder, perbedaan pandangan tersebut berdasarkan pengalaman pahit yang pernah di alami oleh stakeholder dimana munculnya isu *local emotional* yang mempengaruhi kepercayaan dan saling mencurigai satu sama lain, sehingga muncul anggapan saling bermusuhan.
- 2) Desain Kelembagaan, yaitu dengan memperhatikan partisipasi forum kolaborasi kelembagaan, aturan-aturan dasar yang mendukung kolaborasi, serta proses penyelenggaraan kolaborasi yang transparan.
- 3) Kepemimpinan Fasilitatif, yaitu secara luas dapat dilihat sebagai unsur penting dalam membawa semua pihak ke meja perundingan untuk mengarahkan melakukan perundingan-perundingan dan negosiasi guna mencegah masalah yang mungkin akan timbul dalam proses kolaborasi.
- 4) Proses Kolaborasi merupakan suatu proses dimana didalamnya terdapat suatu dialog yang memerlukan partisipasi para pemangku kepentingan, yang akhirnya menghasilkan suatu

keputusan yang disepakati bersama. Anasel dan Gash (2008) mengidentifikasi proses kolaboratif sebagai siklus yang meliputi : dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust-building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2006:6) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya. Peneliti menggunakan sumber data primer yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara terstruktur kepada 6 informan sebagai berikut:

1. Desa Babakan : 1 orang
2. Perangkat Desa Babakan : 1 orang
3. BPD Desa Babakan : 1 orang
4. LPM Desa Babakan : 1 orang
5. Pengelola Hutan Mangrove Desa Babakan : 1 orang
6. Kelompok Penggiat Kawasan Pesisir : 1 orang

Sedangkan, data sekunder diperoleh berdasarkan dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal penelitian yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan metode Moleong (2006) yang terdiri dari reduksi data, triangulasi data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Edukasi Mangrove di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, hasil penelitian ini didapatkan dari data yang di hasilkan dilapangan dengan menggunakan pengumpulan data yang di lakukan, melalui wawancara, obsevasi, dengan 6 informan. penulis uraikan sesuai dengan fokus penelitian mengenai dimensi-dimensi menurut Ansell dan Gash (dalam Islamy, 2008:12) bahwa komponen kolaborasi dibagi menjadi empat bagian yaitu kondisi lapangan, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Berikut hasil pembahasan dan analisis penelitian pada uraian teori diatas diantaranya:

Kondisi Awal

Kondisi Awal, yaitu mengungkapkan bahwa banyaknya proses kolaborasi yang gagal dikarenakan perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan dan stakeholder, perbedaan pandangan tersebut berdasarkan pengalaman pahit yang pernah di alami oleh stakeholder dimana munculnya isu *local emotional* yang mempengaruhi kepercayaan dan saling mencurigai satu sama lain, sehingga muncul anggapan saling bermusuhan.

Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa Pemerintah Desa telah berupaya menjalin kerja sama dengan masyarakat melalui forum musyawarah dan pelibatan dalam program lingkungan, namun partisipasi masih cenderung pasif, terutama dari kelompok masyarakat tertentu. Peran lembaga Desa seperti BPD dan LPM cukup signifikan sebagai penghubung, namun keterbatasan sumber daya dan lemahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama. Selain itu, komunitas pesisir telah menunjukkan inisiatif kuat dalam mengajak warga menjaga lingkungan, namun kesadaran masyarakat dan distribusi informasi yang merata masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Babakan, terlihat bahwa infrastruktur pendukung untuk pengembangan wisata edukasi mangrove, seperti papan informasi edukatif dan fasilitas kebersihan, masih terbatas dan kurang terawat. Beberapa area pesisir menunjukkan adanya kerusakan atau minimnya pemeliharaan, meskipun terdapat upaya dari komunitas dan pengelola lokal untuk menjaga lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara rencana kebijakan dan kondisi aktual di lapangan, serta minimnya dukungan logistik dan sarana pendukung dalam mendukung keterlibatan masyarakat secara aktif.

Menurut teori kolaborasi Gray (2016), kolaborasi seharusnya mampu mengelola perbedaan dan persamaan antara pihak-pihak yang saling bergantung demi mencapai tujuan bersama. Namun, dalam konteks Desa Babakan, kolaborasi belum sepenuhnya berjalan efektif karena perbedaan kepentingan belum dikelola secara konstruktif. Sementara itu, teori Thomson dan Perry (2016) menekankan bahwa kolaborasi melibatkan interaksi aktif dan pengambilan keputusan bersama antar pihak yang otonom. Kenyataannya, di Desa Babakan proses tersebut belum optimal karena masih dominannya peran pihak formal dan kurangnya pengambilan keputusan secara kolektif. Teori Ansell dan Gash (2008) juga menggarisbawahi pentingnya kondisi awal seperti kepercayaan dan kesetaraan, yang dalam kasus ini masih belum kuat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, kondisi awal dalam kolaborasi pengembangan wisata edukasi mangrove belum berjalan secara optimal. Meskipun sudah terdapat niat baik dan inisiatif dari pihak pemerintah desa serta komunitas lokal, sinergi antara semua pemangku kepentingan masih lemah. Proses kolaboratif yang seharusnya melibatkan pengambilan keputusan bersama,

komunikasi terbuka, serta kesadaran akan manfaat kolektif belum sepenuhnya terwujud di Desa Babakan.

Hambatan utama dalam pelaksanaan kolaborasi di tahap awal ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat yang konsisten dan merata, disertai dengan pemahaman yang terbatas terhadap pentingnya kolaborasi jangka panjang. Faktor-faktor seperti kesibukan warga, mentalitas menunggu instruksi, dan minimnya kepercayaan terhadap transparansi program desa turut memperparah kondisi ini. Selain itu, ketimpangan pemahaman antar kelompok masyarakat dan terbatasnya sarana komunikasi juga menjadi penghambat serius.

Upaya perbaikan yang telah dan perlu terus dilakukan mencakup penguatan forum musyawarah desa yang inklusif, dengan memastikan kehadiran berbagai elemen masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan. Pemerintah Desa juga mengupayakan komunikasi yang lebih terbuka dan transparan melalui media informal, serta pelaksanaan edukasi lingkungan berbasis komunitas secara berkelanjutan. Penekanan pada manfaat kolektif non-material dan keberlanjutan ekosistem menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat ke depan.

Desain Kelembagaan

Partisipasi forum kolaborasi kelembagaan mengacu pada sejauh mana berbagai pihak yang relevan (misalnya, pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi) aktif terlibat dalam platform atau wadah yang dibentuk untuk berkolaborasi. Partisipasi yang optimal berarti semua suara didengar, ide-ide beragam dipertimbangkan, dan keputusan diambil secara kolektif, bukan hanya dominasi satu pihak. Jika hanya pihak-pihak tertentu yang mendominasi forum atau ada kelompok penting yang absen, maka legitimasi dan efektivitas kolaborasi akan berkurang.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pengurus komunitas pesisir, dan masyarakat menunjukkan bahwa kolaborasi telah dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari perencanaan kegiatan, pengelolaan sarana, hingga pengawasan. Pemerintah desa memberikan ruang dan dukungan kepada komunitas untuk mengelola kawasan wisata mangrove, sementara komunitas menyediakan tenaga dan gagasan inovatif. Namun, masih terdapat kendala koordinasi dalam aspek pembagian peran yang belum tertulis secara jelas. Beberapa warga menyebutkan bahwa informasi kegiatan terkadang hanya diketahui oleh sebagian kecil masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Babakan, terlihat bahwa proses kolaborasi antara pemerintah Desa dan masyarakat telah mengalami perkembangan positif meskipun belum merata. Terdapat beberapa kegiatan gotong royong dan kerja bakti yang dilakukan oleh komunitas pesisir bersama perangkat desa, terutama dalam menjaga kebersihan kawasan mangrove. Selain itu, musyawarah Desa sering menjadi sarana penyampaian informasi dan diskusi mengenai program-program wisata. Namun, pelibatan masyarakat secara aktif masih lebih dominan pada kelompok

tertentu seperti pegiat lingkungan dan komunitas pemuda, sementara partisipasi dari kelompok rentan atau masyarakat umum cenderung belum optimal.

Menurut teori kolaborasi publik oleh Ansell dan Gash (2008), proses kolaboratif yang efektif membutuhkan tiga aspek utama: keterlibatan partisipatif, dialog tatap muka yang intensif, dan kepercayaan antar aktor. Dalam konteks Desa Babakan, proses dialog sudah mulai dilakukan melalui forum musyawarah dan diskusi komunitas, namun belum sepenuhnya mencakup seluruh unsur masyarakat. Teori Thomson dan Perry (2006) juga menekankan pentingnya koordinasi dan pembagian tanggung jawab yang transparan dalam proses kolaborasi. Kurangnya dokumen kesepakatan formal dan SOP kolaboratif antara Pemerintah Desa dan komunitas mengindikasikan bahwa proses ini masih bersifat informal dan perlu diformalkan agar lebih sistematis.

Secara keseluruhan, proses kolaborasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat di Desa Babakan sudah mulai berjalan, namun belum optimal. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program masih terbatas pada kelompok tertentu. Meskipun sudah terjadi komunikasi dan koordinasi yang cukup baik antara komunitas dengan pemerintah desa, kelemahan dalam penyebaran informasi serta kurangnya dokumentasi kesepakatan membuat kolaborasi ini belum berlandaskan pada mekanisme yang kuat dan berkelanjutan.

Hambatan utama dalam proses kolaborasi adalah kurangnya sistem komunikasi yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, tidak adanya kesepakatan formal atau pembagian peran tertulis menyebabkan potensi tumpang tindih tugas dan kurangnya akuntabilitas. Faktor lainnya adalah masih lemahnya kapasitas organisasi komunitas lokal dalam menyusun perencanaan dan laporan kegiatan secara administratif, sehingga menyulitkan dalam membangun kemitraan jangka panjang dengan pihak luar, seperti investor atau pemerintah daerah.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Desa mulai mendorong pembentukan kelompok kerja (pokja) kolaboratif antara perangkat desa, BPD, dan komunitas lokal. Selain itu, dilakukan pelatihan pengelolaan administrasi dan perencanaan wisata berbasis masyarakat untuk meningkatkan kapasitas komunitas. Komunikasi antar pihak juga ditingkatkan melalui media sosial dan grup pesan singkat yang lebih mudah diakses oleh warga. Selain itu diperlukan adanya penandatanganan MoU kerja sama dan penyusunan Standar Operasional Prosedur agar proses kerja sama menjadi lebih formal, terstruktur, dan dapat dievaluasi secara berkala.

Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan Fasilitatif, yaitu secara luas dapat dilihat sebagai unsur penting dalam membawa semua pihak ke meja perundingan untuk mengarahkan melakukan perundingan-perundingan dan negosiasi guna mencegah masalah yang mungkin akan timbul dalam proses kolaborasi.

Pengembangan Wisata Edukasi Mangrove melalui Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh aktor kolaboratif di Desa Babakan mengakui pentingnya peran kepemimpinan dalam merangkul dan memberdayakan masyarakat dalam pengembangan wisata edukasi mangrove. Kepala Desa dan perangkat desa dinilai memiliki gaya kepemimpinan fasilitatif, yaitu mampu mengarahkan kebijakan dan menyediakan dukungan operasional. BPD dan LPM berperan sebagai kepemimpinan aspiratif, menjembatani aspirasi masyarakat serta mendorong keterlibatan masyarakat dari bawah. Di sisi lain, tokoh masyarakat seperti pengelola hutan mangrove dan komunitas penggiat kawasan pesisir menunjukkan kepemimpinan berbasis aksi dan keahlian, yang fokus pada edukasi lingkungan dan penggerakan masyarakat di lapangan. Namun, informan juga mengungkapkan bahwa kepemimpinan belum mampu sepenuhnya menggerakkan partisipasi aktif secara menyeluruh dari semua lapisan masyarakat.

Hasil observasi lapangan menunjukkan wujud nyata dari kepemimpinan yang berfungsi sebagai fasilitator, misalnya dalam bentuk fasilitas publik seperti jembatan mangrove, posko komunitas, serta keberadaan papan informasi dan spanduk edukatif. Ini menandakan adanya arahan dan pengelolaan yang bersumber dari pemimpin lokal. Namun, kualitas dan jangkauan dampaknya belum merata. Masih ada bagian masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam kegiatan pelestarian maupun pengembangan wisata. Beberapa fasilitas juga menunjukkan tanda-tanda minimnya pemeliharaan berkala, yang mencerminkan belum sepenuhnya berhasilnya upaya kepemimpinan dalam menciptakan rasa tanggung jawab dan kepemilikan bersama.

Ansell dan Gash (2008) menyebutkan bahwa kepemimpinan fasilitatif adalah kunci keberhasilan kolaborasi, yakni dengan menciptakan ruang dialog, membangun kepercayaan, dan mengelola konflik. Sementara menurut Wijaya (2020), kepemimpinan adalah proses memengaruhi individu untuk mencapai tujuan bersama dengan menumbuhkan partisipasi aktif dan rasa memiliki. Demikian pula Saleh (2020) menekankan pentingnya iklim kerja yang positif dan pendelegasian wewenang yang tepat. Ketiga teori ini menggarisbawahi bahwa efektivitas kepemimpinan tidak hanya dilihat dari arahan kebijakan, tetapi juga dari kemampuannya menumbuhkan keterlibatan menyeluruh dan membentuk struktur dukungan yang adil dan merata.

Berdasarkan hasil penelitian, kepemimpinan fasilitatif di Desa Babakan dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Meski terdapat pengakuan akan pentingnya peran pemimpin dan beberapa tindakan fasilitasi telah dilakukan, dampaknya belum menjangkau seluruh elemen masyarakat. Proses pemberdayaan dan pelibatan masih cenderung bersifat sektoral dan belum menjangkau ke semua kelompok. Partisipasi belum merata, rasa kepemilikan belum terbentuk secara kuat, dan kesenjangan antarkelompok masyarakat masih tampak.

Hambatan utama dalam pelaksanaan kepemimpinan fasilitatif di Desa Babakan adalah adanya hambatan terhadap perubahan dan munculnya kepentingan individu yang menghambat

terbangunnya visi secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, waktu, maupun tenaga, membatasi kemampuan pemimpin untuk memberikan pendampingan yang merata dan berkelanjutan. Kurangnya inisiatif mandiri dari masyarakat juga menjadi tantangan besar, terlebih oleh belum adanya mekanisme yang mengakui dan menyatukan peran pelestari aset publik ke dalam sistem tata kelola desa.

Upaya yang telah dilakukan meliputi penguatan dialog partisipatif antar pemangku kepentingan untuk menyamakan visi dan menurunkan hambatan. Selain itu, perlu pengalokasian sumber daya yang lebih memadai untuk mendukung pelatihan dan pembinaan pelestari aset secara berkelanjutan. Pemerintah desa juga didorong untuk merumuskan regulasi yang mengakui secara resmi peran pelestari aset publik serta mendorong munculnya inisiatif mandiri masyarakat melalui kampanye edukasi dan pemberian apresiasi terhadap kontribusi lokal.

Proses Kolaborasi

Proses Kolaborasi merupakan suatu proses dimana didalamnya terdapat suatu dialog yang memerlukan partisipasi para pemangku kepentingan, yang akhirnya menghasilkan suatu keputusan yang disepakati bersama. Anasel dan Gash (2008) mengidentifikasi proses kolaboratif sebagai siklus yang meliputi: dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust-building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

Berdasarkan hasil wawancara, para informan menyadari pentingnya dialog tatap muka dalam kolaborasi antara Pemerintah Desa, lembaga masyarakat seperti BPD dan LPM, serta komunitas pengelola mangrove. Interaksi langsung dinilai penting untuk membangun kepercayaan, menghindari kesalahpahaman, menyampaikan aspirasi, dan menyelesaikan perbedaan. Pemerintah Desa aktif memfasilitasi musyawarah sebagai ruang negosiasi, sedangkan BPD dan LPM memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mendorong partisipasi. Selain itu, pengelola kawasan pesisir mengandalkan komunikasi langsung untuk transfer pengetahuan teknis dan penguatan komitmen. Selain itu, seluruh informan menjelaskan pentingnya membangun kepercayaan, komitmen bersama, dan pemahaman visi-misi secara menyeluruh dalam mengembangkan wisata edukasi mangrove.

Hasil observasi di Desa Babakan terlihat telah ada komunikasi tatap muka dalam kolaborasi. Fasilitas fisik seperti balai desa, posko komunitas, dan area terbuka dimanfaatkan secara aktif untuk diskusi atau pertemuan warga dan aparat. Infrastruktur wisata mangrove yang terpelihara, papan informasi, serta zona-zona konservasi yang jelas menandakan adanya bentuk komitmen, kepercayaan, dan kesepahaman tentang pemanfaatan ruang. Namun, keterlibatan dan efektivitas interaksi ini masih menjadi hambatan, terutama pada partisipasi merata serta adanya jeda pemahaman antara kelompok masyarakat.

Berdasarkan teori kolaborasi dari Haryanto (2020), Efendi dan Astuti (2021), serta Ansell dan Gash (2008), proses kolaborasi di Desa Babakan belum sepenuhnya memenuhi elemen-elemen penting seperti dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust-building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa dimensi proses kolaborasi dalam pengembangan wisata edukasi mangrove di Desa Babakan belum berjalan secara optimal. Meski semua pihak menyadari pentingnya dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi, dan hasil sementara implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Struktur kolaborasi telah terbentuk dan forum telah tersedia, tetapi kualitas interaksi dan proses dialog belum mampu menciptakan kondisi kolaboratif yang kuat dan efektif.

Hambatan dalam proses kolaborasi ini mencakup keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan komunikasi tatap muka yang menyeluruh, kesenjangan pemahaman antaraktor, minimnya partisipasi untuk menyampaikan pendapat, serta kondisi sebelumnya yang menimbulkan ketidakpercayaan. Selain itu, ketidaksesuaian jadwal, minimnya partisipasi, dan perbedaan kepentingan turut menghambat kolaborasi jangka panjang. Keberagaman latar belakang pendidikan juga menyulitkan tercapainya kesamaan persepsi tentang visi dan misi pembangunan kawasan mangrove.

Upaya yang dilakukan adalah penjadwalan pertemuan yang lebih fleksibel, pendekatan secara personal, penyelenggaraan forum informal, serta pemanfaatan media visual dan digital dalam menyampaikan informasi. Pemerintah Desa juga berupaya menunjukkan konsistensi dalam tindakan, melaksanakan strategi, dan memberikan apresiasi kepada pihak yang berkontribusi. Di samping itu, pelatihan fasilitator, evaluasi internal, dan penyusunan kebijakan yang lebih partisipatif diarahkan untuk memperbaiki proses dalam membangun hubungan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Edukasi Mangrove di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran menunjukkan pada pelaksanaan yang belum optimal. Hal ini ditunjukkan pada dimensi yang belum optimal yaitu dimensi kelembagaan, dimensi kepemimpinan fasilitatif, dan dimensi proses kolaborasi, namun sudah terlaksana secara optimal pada dimensi kondisi awal.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu adanya keterbatasan waktu dan sumber daya untuk komunikasi dan pendampingan yang intensif dan merata, diperparah oleh kurangnya inisiatif mandiri dari masyarakat dan adanya penghambatan terhadap perubahan. Selain itu, pengalaman negatif dan kompleksitas atau kerumitan informasi yang sulit dipahami telah mengurangi kepercayaan dan mengurangi kesamaan pemahaman. Adanya perbedaan prioritas, dan kelelahan partisipasi juga menghambat komitmen yang konsisten.

Upaya yang dilakukan yaitu penyederhanaan informasi dan penggunaan media visual/digital yang menarik, pembentukan forum diskusi yang lebih informal dan aman untuk meningkatkan keberanian berpendapat, serta pengalokasian sumber daya yang lebih memadai untuk program pembinaan berkelanjutan. Yang terpenting, membangun dan menjaga kepercayaan melalui konsistensi tindakan, akuntabilitas transparan, dan apresiasi yang berkelanjutan akan menumbuhkan komitmen dan partisipasi proaktif dari seluruh pemangku kepentingan, demi mencapai visi bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Desa Babakan meningkatkan transparansi informasi melalui media digital dan merumuskan regulasi yang memperjelas peran pelestari aset publik. Pengelola kawasan mangrove perlu menyampaikan informasi konservasi secara menarik dan membangun sistem pelaporan yang transparan dengan pelibatan masyarakat. Komunitas penggiat kawasan pesisir diharapkan memperkuat kapasitas internal, kepemimpinan, serta memperluas jejaring kemitraan eksternal. Sementara itu, masyarakat Desa Babakan didorong untuk proaktif mencari informasi, berpartisipasi dalam forum musyawarah, menyampaikan aspirasi secara konstruktif, serta menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap aset desa dengan memahami manfaat kolaborasi jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Adnan, R., & Maulid, M. (2024). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Tanjung Malaha Kabupaten Kolaka. *Jurnal Publik*, 18(01), 48-61.
- Agus, Santoso. Wijaya. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Di Kawasan Pantai Klayar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan Tahun 2020. Skripsi. Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Efendi, M., & Astuti, S. J. W. (2021). Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Ekowisata Mangrove Di Indonesia. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 1(2), 105-135.
- Haryanto. (2020). *Evaluasi Pembelajaran (Konsep dan Manajemen)*. UNY Press

Pengembangan Wisata Edukasi Mangrove melalui Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

- Maulana, M. Y., Suwarlan, E., & Endah, K. (2025). Aspek Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *Journal Sains Student Research*, 3(5), 604-617.
- Moleong, Lexy. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Nisa Ulzanah, S. (2024). *Strategi Pengembangan Wisata Mangrove Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*. (Skripsi). Universitas Galuh, Ciamis.
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Peraturan Desa Babakan No.03 Tahun 2012 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Permendagri (Peraturan Dalam Negeri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Saleh, C. (2020). *Konsep, pengertian, dan tujuan kolaborasi*. Pustaka Universitas Terbuka.
- Syafutra, I. E., Endah, K., & Sujai, I. (2023). Collaborative Governance Dalam Pendataan Sustainable Development Goals Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Tahun 2020. *Journal of Political and Government Issues*, 1(2), 113-125.
- Thomson, A., & Perry, J. (2006). Collaboration Processes: Inside the Black Box. *Public Administration Review*, 66, 22-32.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata.
- Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.